

Forum Konservasi Orangutan Indonesia

WARTA FORINA



Pusat Rehabilitasi Orangutan: Jalan Panjang Menuju Kebebasan

Edisi Khusus

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	3
Pemerintah dan Pusat Rehabilitasi Orangutan	4
Pusat Rehabilitasi Orangutan di Indonesia: Sejarah Pendirian	8
Animal Welfare: Penjamin Kesejahteraan Orangutan di Pusat Rehabilitasi	12
Infografis: Pelepasliaran Orangutan dari Pusat Rehabilitasi	17
Mengenal Orangutan Veterinary Advisory Group (OVAG)	18
Dokumentasi Rehabilitasi Orangutan	22
Kontak Pusat Rehabilitasi Orangutan Sumatera dan Kalimantan	24
Kontributor	25

Tim Penyusun

Shaniya Utamidata
Fajar Saputra
Ronna Saab
Kharisma Ibrahim

Design & Layout:
Izhar Alkhalifard

Penanggungjawab:
Aldrianto Priadjati



Pengantar Redaksi

Pusat Rehabilitasi: Harapan Konservasi Orangutan di Indonesia

Bicara tentang konservasi orangutan di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari usaha kita untuk mengembalikan kera besar tersebut ke habitatnya. Tujuan yang terlihat mudah, sebenarnya memiliki proses yang panjang dibaliknya.

Mengembalikan insting orangutan yang telah dipelihara oleh manusia bukanlah perkara mudah, apalagi jika sudah dipelihara bertahun-tahun, hidup dengan makanan manusia, di dalam rumah dan diperlakukan seperti anak manusia. Itu yang bernasib “cukup baik”, lalu bagaimana yang “bernasib buruk”, diperlakukan tidak layak, tidur di kandang sempit, di kamar mandi, atau dirantai dalam ruang yang terbatas?

Seperti manusia, setiap perlakuan terhadap mereka menyisakan luka dan trauma yang berbeda. Dengan itu, dibutuhkan pula berbagai tahap panjang yang membutuhkan usaha dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Mulai dari *rescuer*, peneliti perilaku primata, dokter hewan dan paramedis satwa, serta penegak hukum.

Indonesia, saat ini memiliki delapan fasilitas yang menangani rehabilitasi orangutan. Delapan diantaranya berada di Kalimantan, sedangkan dua lainnya berada di Sumatera. Kedelapan fasilitas ini merupakan hasil kemitraan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lembaga Konservasi Khusus, hingga pemerintah daerah.

Karena sejatinya, pusat rehabilitasi orangutan dibangun untuk membantu dan memberikan dukungan pada pemerintah dalam upaya konservasi orangutan dan habitatnya. Dan yang pasti, kesepuluhnya bermuara pada satu tujuan besar bersama: menjaga harapan kita untuk mengembalikan orangutan yang diselamatkan dari konflik, ke habitat aslinya dan dapat bertahan hidup.

Pemerintah dan Pusat Rehabilitasi Orangutan

Tak lain dan tak bukan, tujuan utama dari pusat rehabilitasi orangutan, adalah berhasil mengembalikan perilaku alaminya dan kembali mengantarkan mereka ke habitatnya. Baik sebelum maupun setelah individu orangutan dinyatakan “lulus” dari pusat rehabilitasi, ada proses panjang yang harus dilalui sebelum mereka benar-benar kembali ke rumah aslinya.

Proses inilah yang masih belum banyak diketahui publik perihal konservasi orangutan melalui pusat rehabilitasi. Perihal ini tentunya memerlukan upaya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah Indonesia, peneliti, pemerhati, hingga lembaga non-pemerintah, serta swasta.

Lembaga yang menjalankan program rehabilitasi orangutan di Indonesia merupakan Lembaga Konservasi Khusus. Menurut Peraturan Menteri LHK nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi, definisi Lembaga Konservasi Khusus adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/ atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa. Berbeda dengan Lembaga Konservasi Umum yang dilakukan melalui izin lembaga konservasi, lembaga konservasi khusus dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama.



Oleh karena itu, Pemerintah sangat mendukung Lembaga Konservasi Khusus yang menjalankan rehabilitasi orangutan, tidak hanya sesuai Peraturan Menteri LHK P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019, tetapi juga sesuai Permen LHK nomor P.85/MENHUT-II/2014 dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri LHK P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Berdasarkan data kami saat ini terdapat sebelas unit pusat rehabilitasi orangutan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah mendukung upaya-upaya lembaga konservasi khusus, agar jumlah orangutan di pusat rehabilitasi dapat menurun, melalui upaya orangutan yang direhabilitasi dapat segera memenuhi kriteria untuk dapat dilepasliarkan ke habitat alaminya.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana menyiapkan areal habitat untuk pelepasliaran orangutan yang telah direhabilitasi dan siap dilepasliarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) inventarisasi dan verifikasi telah memberikan arahan kepada seluruh UPT Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk dapat melakukan kajian kesesuaian habitat satwa prioritas dalam

kegiatan inver ini sesuai dengan kebutuhan pengelolaan di masing-masing UPT. Selain itu, UPT juga didorong untuk memasukkan kegiatan kajian kesesuaian habitat untuk pelepasliaran dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) perjanjian kerjasama penguatan fungsi.

Langkah lain yang dilakukan Pemerintah, yaitu dengan menghentikan pemberian izin di hutan primer dan gambut yang menjadi habitat orangutan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II (PIPIB).

Pemerintah bersama mitra meningkatkan *smart patrol* melalui instruksi Menteri LHK no 1/2022 tentang perlindungan satwa liar dari perburuan dan penjeratan, sebaran satwa sudah menjadi pertimbangan bagi Perizinan Berusaha dan persetujuan bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Pemerintah juga melakukan kegiatan pemulihan ekosistem (habitat) yang sekaligus menjadi program nasional untuk Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink.

Pemerintah juga mendorong upaya melalui lintas Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Pusat) untuk tidak mengalokasikan ijin kehutanan, perkebunan, kelapa sawit, pertambangan yang baru di kantong-kantong populasi orangutan.

Pemerintah juga berupaya menghubungkan antar kantong-kantong populasi orangutan yang terfragmentasi melalui pembangunan koridor satwa, contoh: mewajibkan pemegang konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk membangun koridor habitat orangutan yang dicantumkan dalam RKT-nya sehingga tidak boleh panen kalau koridor belum direalisasikan. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: SE.7/PHL/PUPH/HA.1/10/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Dalam Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Mengenai standar operasional, saat ini masing-masing pusat rehabilitasi telah memiliki SOP dalam pengelolaan pusat rehabilitasi. SOP dari masing-masing pengelola pusat rehabilitasi tersebut tentunya telah dibahas bersama dengan UPT Ditjen KSDAE sebelum diterapkan. Secara umum, setiap SOP pengelolaan pusat rehabilitasi orangutan memiliki kesamaan secara garis besar, namun ada beberapa perbedaan yang tidak mendasar dan ini biasanya disebabkan karena perilaku orangutan yang berbeda satu sama lainnya.



menjaga sinergi antar *stakeholder* yang terlibat dalam konservasi orangutan. Konservasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, sehingga dalam hal ini pemerintah menerapkan kerjasama pentahelix dimana keterlibatan pemerintah, LSM, dunia usaha, universitas dan media harus dipadukan dalam upaya konservasi orangutan ini, agar dapat berjalan dengan baik dimana pemerintah sebagai leading sektornya.

Yang perlu juga diperhatikan bahwa Pusat rehabilitasi orangutan atau Lembaga Konservasi Khusus diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama, oleh karena itu pembahasan bersama sejak RPP dan RKT betul-betul harus mencerminkan pencapaian tujuan dari konservasi orangutan, sehingga implementasinya dapat terukur dengan baik.





Pusat Rehabilitasi Orangutan di Indonesia: Sejarah Pendirian

Gunung Leuser dan Tanjung Puting, Titik Awal Rehabilitasi Orangutan

Perjalanan panjang konservasi orangutan melalui pusat rehabilitasi orangutan, dimulai pada tahun 1971. Ketambe, bagian dari Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di Pulau Sumatera dan Camp Leakey, bagian dari Suaka Tanjung Puting (kini menjadi Taman Nasional Tanjung Puting) yang berada di Pulau Kalimantan, merupakan titik awal dari inisiasi pusat rehabilitasi orangutan di Indonesia.

Direktorat PPA, Departemen Pertanian membuka Ketambe sebagai pusat rehabilitasi orangutan untuk merehabilitasi orangutan sitaan dari penduduk dalam rangka penegakan hukum dan konservasi alam. Sejalan dengan kegiatan tersebut, Herman D. Rijksen (Universitas Utrecht, Belanda) juga memulai penelitian ekologi orangutan liar di Ketambe.

Selanjutnya, FZG (Frankfurter Zoologische Gesellschaft) pada tahun 1973 mensponsori Pusat Rehabilitasi orangutan ke-2 di Pulau Sumatra, yaitu di Bukit Lawang-Bohorok, Sumatera Utara (kira-kira 100 km timur Ketambe), sebagian besar orangutan rehabilitasi di Ketambe di pindahkan pada Februari 1979 ke Bukit Lawang. Namun, pada tahun 2002, pusat rehabilitasi orangutan ini resmi tutup. .

Perjalanan pusat rehabilitasi orangutan Camp Leakey tidak jauh berbeda dengan Ketambe, sejalan dengan penelitian orangutan liar yang dilakukan Dr. Birute Galdikas di Camp Leakey, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) Departemen Pertanian, meminta Dr. Birute Galdikas untuk merawat anak orangutan hasil sitaan dari masyarakat di Kumai untuk direhabilitasi sebagai persiapan untuk dikembalikan ke alam.



Berawal dari amanah tersebut, Dr. Birute Galdikas membangun Orangutan Foundation International atau biasa yang disebut sebagai OFI pada tahun 1986. OFI didirikan untuk mendukung usaha pemerintah dalam pelestarian orangutan di Kalimantan melalui riset dan rehabilitasi dengan fasilitas medis yang memadai. Dalam perjalanannya, OFI melanjutkan kegiatan rehabilitasi orangutan tersebut di Orangutan Care Center and Quarantine (OCCQ), yang berlokasi di Pasir Panjang, tidak jauh dari kota Pangkalan Bun.

Program rehabilitasi orangutan ini sudah berjalan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama antara OFI – Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan, pada tanggal 26 Februari 1996. Pada tahun 1997 mulai dibangun OCCQ dengan berbagai fasilitas pendukung. Lalu satu tahun kemudian, pusat rehabilitasi ini aktif digunakan sebagai sarana perawatan dan karantina orangutan hingga saat ini.

Berkembangnya Pusat Rehabilitasi Orangutan

Di Kalimantan Timur, beberapa pecinta dan pemerhati satwa yang berkumpul di dalam Balikpapan Orangutan Society (BOS), mulai menginisiasi rehabilitasi orangutan yang diselamatkan dari perdagangan. Kegiatan tersebut dimulai pada tahun 1991, dan berlokasi di Wanariset Samboja, hutan penelitian milik pemerintah.



**Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari,
Kalimantan Timur.**

Dalam perjalanannya, banyaknya orangutan yang datang dari Kalimantan Tengah membuat BOS kembali mendirikan fasilitas rehabilitasi baru, yaitu Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng. Pusat rehabilitasi ini berdiri pada tahun 1999 yang berjarak 30 km dari kota Palangka Raya, ibu kota Kalimantan Tengah. Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng ini memperkuat upaya penyelamatan orangutan di Kalimantan Tengah yang sebelumnya hanya dilakukan oleh OFI melalui OCCQ.



Fani, orangutan di Pusat Rehabilitasi Orangutan BOSF Kalimantan Timur.

©BOSF

Selanjutnya, pada tahun 2003, nama Balikpapan Orangutan Society secara resmi berganti menjadi Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) atau Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo. Selang 3 tahun kemudian, pusat rehabilitasi di Wanariset Samboja dipindahkan ke lokasi baru dengan nama Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari. Pusat rehabilitasi ini bukan menjadi satu-satunya di Kalimantan Timur, karena dalam perjalanannya terdapat 3 pusat rehabilitasi orangutan lainnya.

Pendirian pusat rehabilitasi orangutan yang dikelola oleh Centre for Orangutan Protection atau COP dimulai melalui kerjasama dengan pemerintah pada tahun 2013 terkait program konservasi orangutan di Kalimantan Timur. Di akhir tahun tersebut, dimulailah pembangunan Pusat Perlindungan Orangutan Labanan, yang kini berganti nama menjadi Bornean Orangutan Rescue Alliance atau BORA.

Pada tahun yang sama, Dr. Signe Preuschoft dan Dr. Ishak Yassir dari Balai Penelitian Teknologi Konservasi (BALITEK) Samboja, bersama drh. Citrakasih M. Nente menginisiasi pembentukan Yayasan Jejak pulang. Awal mula terbentuknya ide untuk membangun

pusat rehabilitasi baru yang bernama Orangutan Forest School tersebut muncul pada akhir tahun 2013, namun pada akhirnya terealisasi dan disahkan secara hukum pada tanggal 28 Maret 2014.

Masih di Kalimantan Timur, Pusat Suaka Orangutan Arsari (PSO Arsari), yang diinisiasi oleh Yayasan Arsari Djojohadikusumo, merupakan salah satu pusat rehabilitasi orangutan yang berdiri pada tahun 2019. Pusat suaka orangutan ini memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan pusat rehabilitasi lainnya. PSO Arsari memilih untuk merehabilitasi orangutan jantan yang sudah lanjut usia, dengan harapan bahwa mereka akan dapat bertahan di lahan-lahan pelepasliaran yang dikhususkan untuk mereka. Salah satu alasannya hal itu dilakukan karena bertujuan meminimalisir konflik antara orangutan jantan lansia telah di rehabilitasi, dengan jantan muda yang memiliki kemungkinan besar dapat mengalahkan mereka dalam perebutan teritori.

Berdirinya pusat rehabilitasi orangutan di Kalimantan Barat diawali di tahun 2009 oleh Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). Banyaknya orangutan di Kalimantan Barat yang harus dipindahkan ke Kalimantan Tengah untuk mendapatkan perawatan di pusat rehabilitasi, menggerakkan YIARI untuk mendirikan pusat rehabilitasi.

Pasalnya, pemindahan orangutan dari satu provinsi ke provinsi lainnya memakan waktu yang cukup panjang, serta biaya yang tidak sedikit. Didirikannya pusat rehabilitasi di Kalimantan Barat ini juga mempercepat proses pemeriksaan dan perawatan medis yang dibutuhkan oleh orangutan sebelum memasuki proses rehabilitasi. Bekerjasama dengan BKSDA Kalbar, YIARI memilih Kabupaten Ketapang sebagai lokasi pusat rehabilitasi ini.



Sintang Orangutan Center, Kalimantan Barat.

©Sintang Orangutan Center



Selain di Ketapang, Kalimantan Barat juga memiliki satu pusat rehabilitasi lain yaitu di Kabupaten Sintang. Pendirian pusat rehabilitasi yang satu ini, bisa dibilang cukup unik. Pastor Jacques Maessen, seorang pastor asal Belanda yang memiliki kepedulian terhadap satwa, mendirikan sebuah yayasan bersama warga lokal yaitu Yayasan Kobus, yang kemudian menjadi induk organisasi dari Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang (YPOS) atau yang juga dikenal sebagai Sintang Orangutan Rescue Center (SOC).

Di Sumatera, Program Reintroduksi Orangutan Sumatera (PROS) telah berjalan sejak tahun 1998, menjadikan program ini sebagai program rehabilitasi orangutan tertua di Pulau Sumatera. Inisiasi program reintroduksi orangutan di bentang alam Bukit Tigapuluh ini, dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Bukit Tigapuluh Provinsi Jambi dan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau bersama Frankfurt Zoological Society Indonesia (FZS Indonesia).

Bentang alam Bukit Tigapuluh (termasuk di dalamnya Taman Nasional Bukit Tigapuluh serta zona penyangga di sekitarnya), merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Sumatera. Keberagaman vegetasi sumber pakan orangutan yang dapat menyokong berjalannya Program Reintroduksi Orangutan Sumatera, adalah salah satu alasan dipilihnya bentang alam Bukit Tigapuluh untuk menjadi kawasan program reintroduksi ini.

Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sumatera merupakan pusat rehabilitasi orangutan yang didirikan pada tahun 2001 oleh Yayasan Ekosistem Lestari (YEL). Pusat rehabilitasi orangutan pertama di pulau Sumatera ini adalah hasil kerjasama YEL dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang didukung oleh PanEco Foundation. Kerjasama ini juga menggerakkan kolaborasi yang dikenal sebagai Sumatran Orangutan Conservation Programme atau SOCP.

Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sumatera menjadi satu-satunya yang ada di Sumatera, sebelum pada akhirnya dibangun Sumatera Rescue Alliance atau SRA. Pembangunan SRA telah dimulai pada tahun 2020 didukung oleh The Orangutan Project, yang kemudian diresmikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021. SRA ini, merupakan respon dari adanya kasus konflik satwa yang ditangani oleh dua organisasi yang bergerak dalam penyelamatan orangutan, yaitu COP dan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari - Orangutan Information Center (YSOL-OIC).

Animal Welfare: Penjamin Kesejahteraan Orangutan di Pusat Rehabilitasi



Pemeriksaan orangutan di Pusat Rehabilitasi

Kesejahteraan Satwa, Sejatinya...

Merupakan konsep dasar dari bagaimana kita dapat memperlakukan satwa dengan baik, untuk tujuan dan maksud tertentu. Kesejahteraan satwa digambarkan sebagai **"The Five Freedoms"** dalam amandemen pertama *Bill of Rights* Pemerintah Inggris pada tahun 1965 sebagai kondisi : *stand up, lie down, turn around, groom themselves and stretch their limbs* – atau berdiri, berbaring, berbalik, merawat diri, serta meregangkan tubuh mereka. Kemudian, kelima prinsip tersebut disempurnakan oleh UK Farm Animal Council pada tahun 1992 sebagai kondisi dimana satwa tersebut:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus

2. Bebas dari rasa tidak nyaman

3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit

4. Bebas dari rasa takut dan stress

5. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alami

Kelima prinsip ini merupakan salah satu pondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pusat rehabilitasi satwa, termasuk orangutan. Tanpa adanya perencanaan yang baik untuk pemenuhan kesejahteraan satwa, orangutan di pusat rehabilitasi tak akan lain nasibnya dari orangutan peliharaan di rumah warga.

Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi pusat rehabilitasi orangutan tidaklah sedikit. Contohnya, akses yang sulit dari kota menuju pusat rehabilitasi orangutan. Hal ini tentunya mempengaruhi banyak hal, mulai dari pemenuhan pakan, kebutuhan medis, tidak bisa memiliki peralatan yang membutuhkan daya listrik yang besar, hingga pemenuhan rasa aman dan melindungi satwa dari rasa takut dan stress.

Akses yang cukup sulit, mempengaruhi pemenuhan pakan orangutan di pusat rehabilitasi. Di BORA misalnya, dengan akses yang jauh dari kota, pembelian pakan hanya bisa dilakukan satu kali dalam seminggu. Dengan listrik yang terbatas, keberadaan pendingin yang membutuhkan daya listrik besar pun belum bisa digunakan. Ditambah lagi dengan kelembaban lebih dari 75% yang tentunya akan mempengaruhi kualitas pakan yang diberikan.

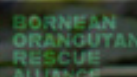
Solusinya adalah dengan pengelolaan dan perencanaan. 500-600 kg buah yang dibeli tersebut, tidak semuanya dibeli dalam keadaan sudah matang. Lalu, buah yang diberikan terlebih dahulu adalah yang memiliki kemungkinan busuk lebih cepat, sehingga masih ada stok buah yang lebih segar untuk hari-hari berikutnya.

Lain tempat, lain pula ceritanya. Di PSO Arsari, ketersediaan pakan serta perawatan medis menjadi sorotan utama dari kelima prinsip kesejahteraan satwa yang sedang direhabilitasi. Hal ini juga dikarenakan oleh kekhususan dari PSO Arsari sendiri, yaitu hanya merehabilitasi orangutan jantan yang sudah berusia lanjut. Maka dari itu, pemenuhan nutrisi yang tepat dan tercukupi menjadi salah satu pondasi untuk menjaga kesehatan orangutan di pusat rehabilitasi.

Diceritakan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan animal welfare membutuhkan dedikasi waktu yang cukup panjang serta sumber daya yang tidak sedikit. Pasalnya, kesejahteraan satwa dianggap sebagai kebutuhan individu, dan setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka riset untuk mendalami kesesuaian kebutuhan individual sangat diperlukan.

Di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Sumatera, salah satu cara untuk memberikan nutrisi yang tepat adalah dengan memberikan pakan dengan kemiripan kandungan maupun *processing* dengan makanan makanan di hutan. Pemberian pakan juga disesuaikan dengan *Basal Metabolic Rate* atau BMR yang telah dihitung. Selain itu, jumlah dan jenis kualitasnya juga harus yang mengacu pada pakan mereka di hutan, menimbang bahwa kecenderungan orangutan memilih buah yang setengah matang di hutan, karena buah matang cenderung memiliki kandungan gula yang tinggi.

Pengasuh orangutan untuk membantu orangutan agar tidak takut dan stress.



Sekolah Hutan yang merupakan perwujudan dari prinsip bebas untuk mengekspresikan perilaku alami dari orangutan. Di Sintang Orangutan Center, Sekolah Hutan diberikan perlindungan ekstra. Dua kawasan seluas 2,1 dan 5 hektar tersebut dibatasi dengan pagar listrik untuk mencegah kemungkinan terburuk, seperti konflik dengan satwa lain maupun dengan masyarakat. Tujuannya, agar orangutan yang sedang dalam masa Sekolah Hutan bebas dari rasa takut dan tidak nyaman.

Dalam mengatasi rasa takut, stres dan tidak nyaman, semua pusat rehabilitasi menceritakan hal yang sama. Peran keeper, animal handler, atau pengasuh, yang sama-sama berperan untuk menggantikan sementara peran "ibu" dari para bayi dan anak orangutan di pusat rehabilitasi, semuanya adalah putra-putri daerah dimana pusat rehabilitasi didirikan.

Salah satu cara yang diceritakan dari Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang, para calon pengasuh orangutan adalah anak-anak desa sekitar yang sejak awal terlihat memiliki ketertarikan pada satwa ketika pusat rehabilitasi mulai dibangun. Kemudian, mereka akan diberikan pelatihan untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan penanganan yang baik dan benar di situasi yang dibutuhkan.

Menurut YIARI, kesejahteraan satwa tidak hanya mengenai fasilitas yang diberikan oleh pengelola, namun juga mengenai kesiapan individu saat dikembalikan ke habitatnya. Dari keempat poin yang menjadi acuan mengenai kesiapan pelepasliaran orangutan, yaitu:

1. Mencapai usia minimum dan sehat.
2. Idealnya dilepaskan di wilayah jelajah geografis sesuai sub-species
3. Memiliki keterampilan hutan yang penting, atau memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mempelajarinya
4. Memiliki risiko minimal untuk keselamatan staf atau masyarakat umum.



Orangutan yang sedang belajar mengenal rayap sebagai salah satu makanannya.